



**RESPON PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP INTERVENSI
KOLONIAL BELANDA DI MINANGKABAU**

**Azaria Thahira¹; Imellya Junita²; Nur Azizah Dinni Putri³; Hestiana
Valencia⁴; Lisna Sandora⁵**

*^{1,2,3,4,5} Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Indonesia*

¹Email Korespondensi: azariathahira@gmail.com

Diterima: 16 Juni 2025

Disetujui: 28 Juni 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

This article discusses the dynamics of Islamic education in Minangkabau during the Dutch colonial period, particularly how the local community responded to the educational policies implemented by the colonial government. The secular nature of colonial education and its separation from religious education triggered concerns among ulama and traditional leaders, especially because Dutch education did not accommodate Islamic values. The purpose of this study is to determine how the Minangkabau community responded to the educational policies implemented by the colonial government. This study uses a qualitative approach with historical methods to trace and analyse the response of Islamic education to Dutch colonial intervention in Minangkabau. Through a literature study, this article traces how the Minangkabau people, especially the reformers, developed an alternative education system through the establishment of madrasahs that combined religious and general sciences. This response is not only a form of resistance to colonial domination, but also reflects an effort to maintain Islamic identity and local culture in the midst of modernization. This study shows that Islamic education in Minangkabau developed dynamically as a result of the interaction between external pressures from colonialism and the internal forces of society that wanted to maintain its religious values.

Keywords: *Dutch Colonialism; Education; Minangkabau.*

A. Pendahuluan

Kebijakan Kolonial Belanda yang diterapkan di berbagai wilayah Indonesia memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat setempat. Di antara wilayah-wilayah tersebut, Minangkabau dikenal sebagai daerah yang memiliki budaya yang kaya serta tradisi pendidikan yang sangat kuat. Sejak zaman dahulu, masyarakat Minangkabau telah mengakui pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan individu. Hal ini terlihat dari pepatah

“Alam takambang jadi guru”, yang menunjukkan betapa alam dan lingkungan dijadikan sebagai sumber pembelajaran yang tak terbatas (S. Putra, 2018).

Di Minangkabau pendidikan sudah berkembang sejak masa pra-kolonial, pendidikan agama dan adat menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter individu. Keberadaan surau sebagai pusat pendidikan tradisional di Minangkabau yang mengalami proses islamisasi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau selama berabad-abad, dan sangat berpengaruh dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam di Minangkabau (Satria, 2016). Di sisi lain, pendidikan adat yang diterapkan melalui sistem matrilineal mengajarkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Namun setelah Belanda masuk ke wilayah Minangkabau, sistem pendidikan mulai menghadapi tantangan besar dengan masuknya kebijakan pendidikan kolonial Belanda.

Pada masa kolonial, Belanda berusaha untuk menerapkan sistem pendidikan Barat yang bersifat sekuler dan terpusat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terdidik dan loyal kepada pemerintahan kolonial, tetapi juga untuk mengendalikan dan mengurangi pengaruh pendidikan agama Islam yang kuat di Minangkabau. Namun respons masyarakat Minangkabau terhadap kebijakan ini menunjukkan daya tahan dan adaptabilitas yang luar biasa. Alih-alih mengabaikan pendidikan tradisional, mereka mulai mendirikan madrasah sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperkuat pendidikan agama Islam. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga memasukkan unsur-unsur pendidikan umum yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau mampu beradaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan elemen-elemen baru yang dibawa oleh kolonialisme.

Tulisan ini akan menganalisis respon pendidikan Islam lokal di Minangkabau terhadap kebijakan yang diterapkan Kolonial Belanda terhadap sistem pendidikan. Fokus utama akan diberikan pada lahirnya sekolah-sekolah madrasah sebagai bentuk resistensi dan adaptasi terhadap kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan historis dan analisis, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika kebijakan kolonial, serta transformasi pendidikan Minangkabau sebagai bentuk perlawanan intelektual dan kultural terhadap kolonialisme.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis untuk menelusuri dan menganalisis respon pendidikan Islam terhadap intervensi kolonial Belanda di Minangkabau (Rajab & Putra, 2023). Metode ini dilakukan dengan menelaah data dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku sejarah, artikel ilmiah, dan jurnal akademik yang membahas perkembangan pendidikan Islam serta kebijakan kolonial pada masa tersebut. Proses analisis dilakukan melalui tahapan *heuristik* (pengumpulan data), kritik sumber untuk menilai keakuratan dan relevansi data, interpretasi terhadap fakta-fakta sejarah yang ditemukan, serta penyusunan hist oriografi dalam bentuk narasi ilmiah (Prenduan, 2024). Dengan menggunakan sumber-sumber sekunder yang kredibel, penelitian ini berupaya menggambarkan dinamika pendidikan Islam sebagai bentuk respon terhadap penetrasi pendidikan kolonial Belanda, khususnya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Kebijakan Pemerintah Belanda Terhadap Sistem Pendidikan di Minangkabau

Kolonial Belanda memerintah selama tiga setengah abad di Indonesia dengan menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak signifikan terhadap masyarakat di Indonesia (Alfurqan, 2020). Kebijakan tersebut sering kali didasarkan pada strategi politik dan ekonomi, dengan tujuan utama mempertahankan kendali dan mengintegrasikan masyarakat pribumi ke dalam struktur kolonial. Belanda pertama kali masuk ke wilayah Minangkabau pada awal abad ke-17 (Yasmansyah & Iswantir, 2021). Mereka mulai menetap di Kota Padang sebagai pusat kedudukan dan pusat perdagangan, ditandai dengan dibangunnya benteng yang menjadi basis operasi mereka di daerah tersebut. Belanda secara bertahap memperluas pengaruhnya di Minangkabau, terutama setelah terjadinya Perjanjian Painan yang memberikan hak monopoli kepada Belanda atas perdagangan emas di wilayah tersebut. Perjanjian ini merupakan salah satu langkah awal Belanda untuk memperkuat posisi mereka di Minangkabau.

Kedatangan Belanda tersebut, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Minangkabau, baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya bahkan sistem pendidikan. Berbagai bentuk kebijakan yang diterapkan Belanda dalam sistem pendidikan di

Minangkabau, salah satu kebijakan utamanya adalah sistem dualisme pendidikan (Ahmad Muchlishon, 2022). Pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah negeri yang didasarkan dengan kurikulum Barat, dengan tujuan terciptanya tenaga kerja yang terampil untuk administrasi kolonial. Di sisi lain, mereka mengawasi dan mengatur pendidikan Islam dengan regulasi yang ketat. Kebijakan kontrol dan pengawasan ini berlaku pada setiap individu dan juga guru-guru yang mengajar. Pemerintah kolonial berusaha untuk mengurangi pengaruh politik dari pendidikan Islam dengan mengawasi kurikulum dan aktivitas pengajaran di surau dan madrasah (Ahya et al., 2024). Hal ini disebabkan karena kekhawatiran kolonial Belanda terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dapat menjadi basis perlawanan terhadap pemerintahan mereka. Kebijakan kolonial ini juga memaksa beberapa perubahan dalam kurikulum pendidikan Islam yang awalnya hanya terfokus pada studi agama. Lembaga pendidikan Islam yang ingin tetap beroperasi harus menyesuaikan kurikulum mereka, yang menyebabkan terjadinya integrasi beberapa mata pelajaran (Hasan et al., 2023).

Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*), dengan mengharuskan para petani untuk menanam kopi untuk memenuhi kuota yang mereka tetapkan. Kebijakan tanam paksa ini memberikan lowongan pekerjaan kepada orang Minangkabau. Oleh karena itu pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang dapat menunjang pekerjaan tersebut. Sekolah-sekolah ini, memberikan kesempatan terhadap orang Minangkabau yang untuk berkarir dalam sistem kolonial. Kelompok-kelompok yang tertarik dengan sekolah-sekolah ini biasanya berasal dari kelas menengah yang berasal dari nagari-nagari perbukitan, karena secara geografis terletak di daerah tanaman kopi. Orang Minangkabau sangat berminat untuk menjadi pegawai bagi pemerintahan Belanda karena sangat menguntungkan untuk mencapai kekuasaan, prestise, dan kekayaan. Para pemimpin adat atau tokoh yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda umumnya kurang tertarik pada pendidikan, karena jabatan mereka sudah dijamin oleh pihak kolonial, bukan diperoleh dari kemampuan pribadi mereka.

Pada tahun 1825 Belanda mendirikan sekolah sekuler pertama di Padang, di bawah pimpinan Jenderal de Stuers. Sekolah ini didirikan untuk memperkuat pertahanan Belanda di Minangkabau. (Azra, 2017) Menurut Elizabeth, Jenderal de Stuers berharap sekolah ini diminati oleh para pewaris bangsawan pantai, yang bertujuan untuk menghasilkan

penghulu yang melek huruf dan beradab. (Graves, 2007) Belanda menganggap pendidikan sekuler membantu untuk memberikan pencerahan terhadap kepala adat namun, sebagian masyarakat di Minangkabau enggan menginvestasikan harta bendanya untuk menyekolahkan anak-anak mereka, kecuali keuntungan yang didapatkan lebih besar daripada pendapatan mereka. Tetapi, ada juga sejumlah orang Minangkabau yang tertarik dengan pendidikan sekuler tersebut, seperti para keluarga yang sudah mapan seperti pedagang atau pengrajin lebih memilih melanjutkan usahanya daripada menjadi pegawai pemerintahan Belanda, mereka hanya memanfaatkan sekolah sekuler agar anak-anak mereka belajar tentang pembukuan dan surat-menyurat. Setelah pandai, anak mereka ditarik keluar untuk melanjutkan usaha keluarga.

Sekolah tersebut secara keseluruhan dibiayai oleh Belanda, pada saat itu ada sekitar 80 anak yang mendaftar ke sekolah tersebut. Namun, alasan para keluarga yang mengirim anaknya ke sekolah ini bukan karena merasa pendidikan yang ditempuh anaknya penting dan berguna, tetapi karena rasa segan terhadap pemerintahan Belanda. Selang beberapa tahun kemudian, sekolah ini ditutup disebabkan karena salah satu petinggi adat berselisih pendapat dengan guru misionaris yang bernama Evans yang melarang pembacaan Al-Quran di dalam kelas. Petinggi adat tersebut kemudian menarik anaknya keluar dari sekolah tersebut.

Setelah sekolah sekuler pertama ditutup, seorang pejabat Belanda yang bernama C.P.C Steinmetz kembali mendirikan sekolah sekuler dengan sebutan sekolah nagari atau *nagari schools* pada tahun 1840-an. Didirikan atas inisiatif sendiri, di bantu oleh pejabat pribumi setempat dan semua biaya ditanggung masyarakat. Sekolah ini berada di Padang Darat yaitu di kawasan dataran tinggi. Sekolah ini awalnya didirikan di nagari-nagari di daerah perbukitan seperti Rao, Puar Datar, Matur, dan pusat-pusat administratif seperti di Bukittinggi, Batusangkar, dan Solok. Anak-anak yang berminat untuk sekolah disini biasanya berasal dari keluarga menengah yang ingin memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yaitu pekerjaan yang bisa memperbaiki kedudukan sosial keluarga mereka. (Graves, 2007)

Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang terdidik, agar mereka bisa bekerja di pemerintahan atau menjalankan tugas-tugas penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu sekolah ini juga diharapkan memperkenalkan arti penting pendidikan kepada generasi muda di Minangkabau, yang bukan hanya sekedar bisa

membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga generasi muda yang memiliki perilaku yang beradab serta aspek-aspek lain dari gaya hidup dan budaya Eropa. Belanda hanya berperan sebagai kontrolir saja dengan melakukan kunjungan sesekali, karena pejabat Belanda yang berada di daerah Minangkabau tidak banyak jumlahnya, sebagian dari pejabat-pejabat tersebut ditempatkan di bagian pengawasan dan pengontrolan produksi kopi.

Kurikulum dasar yang dipakai yaitu dengan cara membagi murid menjadi empat tingkatan. Kelas pertama adalah murid yang baru mulai membaca, kelas kedua belajar berhitung sederhana, kelas ketiga belajar menulis dan di kelas empat belajar menulis dan berhitung lanjutan, menyalin essai, pembukuan, dan geografi (Khilal, 2023). Semua pelajaran yang diberikan berbahasa melayu karena bahasa Minangkabau sangat dekat dengan bahasa Melayu. Pelajaran agama tidak dimasukkan dalam kurikulum, dan murid pun dilarang mengenakan pakaian bergaya Eropa. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran masyarakat Minangkabau akan menganggap sekolah-sekolah sekuler ini bertujuan untuk menjauhkan anak-anak mereka dari agama dan mengarahkan mereka pada budaya Barat (Ilyas, 2022). Biasanya, kecurigaan seperti ini datang dari kalangan keluarga berada yang memang tidak tertarik dengan pendidikan sekuler yang ditawarkan oleh pemerintah. Berbeda dari sekolah sebelumnya yang bersifat tertutup, sekolah ini terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang latar belakang sosial. Pelajaran yang paling banyak diminati adalah yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi pemerintahan, seperti keterampilan mencatat dan membuat laporan keuangan. (Graves, 2007)

Sebagian murid di sekolah nagari memilih berhenti setelah belajar selama satu atau dua tahun saja. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga tokoh adat yang merasa tidak perlu belajar membaca dan menulis. Sementara yang lain berhenti karena hanya ingin mempelajari dasar-dasar baca tulis dan pembukuan untuk keperluan berdagang. Pada tahun 1846 tercatat ada 106 dari 416 murid yang mendaftar, berhenti bersekolah sebelum tamat. Namun, tiga tahun setelah sekolah tersebut dibuka sudah terdapat 75 murid yang tamat dari sekolah tersebut dan ditempatkan sebagai juru-tulis dalam kegiatan penanaman kopi. Sekolah-sekolah nagari yang sudah didirikan ini sulit untuk mempertahankannya karena orang yang duduk di dewan nagari, jarang yang mendukung sekolah-sekolah sekuler ini. Dengan begitu, sekolah-sekolah ini mengalami kesulitan dana. Steinmetz

meminta agar pemerintahan Belanda bersedia membiayai pendidikan, namun semua usaha untuk mendapatkan dana tersebut gagal.

Melihat begitu besarnya manfaat sekolah nagari bagi pemerintah, terutama dalam menghadapi kekurangan tenaga kerja, Gubernur Van Swieten berusaha mendirikan sekolah model Steinmetz. Pada tahun 1850-an pembangunan sekolah nagari mulai di arahkan ke daerah dataran rendah pantai (*Padangsche Benedenlanden*). Masyarakat diminta untuk membantu pembangunan gedung dan pengadaan alat-alatnya. Sementara pemerintah hanya memberikan sedikit bantuan keuangan. Pada tahun 1853 dibuka sekolah nagari di Padang, kemudian di Pariaman dan Air Bangis pada tahun 1854. Di Pesisir Selatan sekolah nagari dibuka pertama kali pada tahun 1858, dan di Asam Kumbang berdiri pada tahun 1859. Sementara itu di daerah pedalaman utara, berdiri sekolah nagari di Rao, Lubuk Sikaping, Panti, dan Talu. Sehingga dalam tahun 1860 sekolah nagari sudah menyebar di seluruh pelosok Minangkabau.

Ide sekolah nagari ini telah menjadi model bagi kebanyakan sekolah yang didirikan di wilayah Minangkabau. Pada masa awal, para petinggi adat dan pemerintah berinisiatif untuk menyediakan suatu ruang yang cukup memadai dengan dibantu oleh masyarakat setempat untuk membuat meja, kursi, dan perabotan lain yang dibutuhkan. Anak nagari yang bisa baca-tulis ditunjuk sebagai guru, yang biasanya berasal dari pengawas gudang kopi atau juru tulis di kantor pemerintahan setempat, dan digaji dari keuangan nagari. Sekolah ini tidak dipungut biaya, namun para murid biasanya membiayai keperluan sekolahnya sendiri. Pada awalnya banyak orang tua murid yang merasa beban sekolah tersebut terlalu berat daripada keuntungan yang didapatkan. Beberapa daerah ada berhasil menekankan para dewan nagari untuk menyediakan perlengkapan sekolah dan pakaian bagi para murid sehingga tidak membebankan para orang tua murid.

Seiring dengan berkembangnya sekolah-sekolah di dataran rendah pantai, pemerintah Belanda menyadari bahwa sekolah tersebut telah berhasil membantu dalam pengadaan tenaga terampil untuk menunjang program pemerintah. Sesuai dengan kebutuhan yang semakin banyak, pemerintah mulai memikirkan tentang mutu pendidikan, dengan meningkatkan jumlah guru. Oleh karena itu pemerintah Belanda mendirikan *normal school* atau sekolah guru dalam bahasa Belanda disebut *Kweekschool*, didirikan lewat dektrit pemerintah pada tanggal 1 April 1856. *Normal school* didirikan di Bukittinggi yang merupakan kota perdagangan yang paling dinamis dan pusat administrasi di dataran tinggi

yang jauh dari kecurigaan dan persaingan di dalam kehidupan dibandingkan dengan kota-kota lain. Bukittinggi juga menjadi pusat penjualan kopi bagi daerah produksi yang penting di bagian utara. Oleh karena itu, Bukittinggi merupakan tempat yang cocok untuk penempatan pegawai negeri sipil. Sebagian besar murid berasal dari Agam, dan yang lainnya berasal dari Tanah Datar, Solok, dan Padang. (Graves, 2007)

Seorang asisiten residen Solok, yaitu Van Ophuijzen dipindahkan ke Bukittinggi dan ditugaskan untuk menjadi pengawas umum sekolah ini. Ia dipilih karena lancar berbahasa Melayu dan bisa baca tulis dalam bahasa Arab. Kepala sekolah yang ditunjuk bernama Abdul Latief, orang Minangkabau yang merupakan saudara dari jaksa kepala di Keresidenan *Padangsche Benedenlanden*, Abdul Latief mempunyai pengaruh politik yang besar daripada kemampuannya di bidang pengajaran. Keputusan untuk menunjuk kepala sekolah yang berasal dari orang Minangkabau, bertujuan agar *normal school* Bukittinggi itu menarik minat masyarakat Minangkabau, daripada harus di serahkan kepada orang Belanda. Tujuan didirikannya sekolah adalah untuk menyediakan karir guru dengan cara mendapat pelatihan yang intensif. Meskipun tujuannya untuk mencetak calon-calon guru profesional, kenyataannya tamatan dari sekolah ini banyak juga yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan dan tenaga jaksa di Badan Peradilan (*Landraad*). Dari tahun 1856 sampai tahun 1866 *normal school* sudah menghasilkan tamatan sebanyak 49 orang, 12 orang diantaranya saja yang berhasil menjadi guru, selebihnya ada yang menjadi juru tulis, mantri kopi, dan mantri cacar.

Normal school memiliki kurikulum yang mirip dengan yang ada di Surakarta. Persyaratan untuk masuk ke sekolah ini yaitu minimal berusia 14 tahun, dan sudah bisa baca tulis dalam bahasa Melayu, serta memiliki kemampuan dasar berhitung. Murid yang ingin mendaftar tidak diharuskan tamat dari sekolah negeri. Kurikulum untuk tiga tahun termasuk di antaranya menulis dan membaca dalam bahasa Melayu (Arab-Melayu-Latin), geografi, ilmu ukur, pembukuan, menulis surat (koresponden), dan menulis laporan resmi dengan format yang benar. Mata pelajaran ini dipersiapkan oleh murid-murid *normal school* agar mereka bisa mengajar di sekolah nagari dan membimbing anak-anak menjadi calon pegawai negeri yang terampil dan profesional.

Pemerintahan Belanda di Batavia tidak siap menginvestasikan dana untuk sistem pendidikan di Minangkabau. Pemerintah Belanda di Batavia mengusulkan untuk mengirim

murid-murid dari Sumatera ke *Normal School* di Surakarta, namun pemuda-pemuda yang memenuhi syarat untuk menempuh pendidikan di Surakarta menolak usulan tersebut karena mereka tidak mau meninggalkan kampung halaman mereka, walaupun hanya selama dua tahun. Selain itu kurikulum yang ada di Surakarta disusun untuk pemakai bahasa dan budaya Jawa, yang tidak cocok bagi guru yang berasal dari Minangkabau.

Memasuki tahun 1870-an, kerangka politik kolonial mengalami perubahan besar ditandai dengan Era Liberal, yang berpengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah nagari langsung dibawah kontrol pemerintah Belanda, dalam artian pemerintah bukan hanya terlibat dalam urusan pendanaan, tetapi juga mengurus organisasi dan pembuatan kurikulum sekolah. Keterlibatan pemerintah Belanda semakin terlihat sejak *normal school* berubah nama menjadi Sekolah Raja pada tahun 1872, karena mendapatkan bantuan keuangan. Sekolah ini memberikan kurikulum yang tergolong rumit dari sebelumnya, dengan menambahkan mata pelajaran baru seperti paedologi, geometri, menggambar, menyanyi, dan beberapa mata pelajaran yang bersifat pengetahuan, terutama di bidang pertanian. Selain itu, mata pelajaran lainnya yaitu Bahasa Belanda yang menjadi mata pelajaran wajib.

Setelah mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Belanda, sekolah raja mulai mengalami kemajuan pesat. Bahkan, pada akhir abad ke-19 sekolah ini telah menjadi sentra pendidikan untuk kawasan Pulau Sumatera. Sampai pada tahun 1908 sekolah raja menghasilkan alumni sebanyak 402 orang yang berasal dari berbagai daerah seperti dari berbagai nagari di Minangkabau, Tapanuli, Riau, Aceh, Bengkulu, Palembang, Bangka, dan Lampung. Menurut Etmi Hardi yang dikutip dari Mestika Zed, berkembangnya pendidikan di Minangkabau pada akhir abad ke-19, sangat mempengaruhi lajunya proses modernisasi yang merubah lapisan struktural dalam masyarakat. Proses industrialisasi, baik itu perkebunan dan pertambangan, perubahan sistem biriorasi, urbanisasi, perluasan infrastruktur, maupun mobilitas sosial dalam jaringan yang baru. Terjadinya proses diferensiasi dan spesialisasi dalam lapangan pekerjaan serta hubungan kerja. Sistem masyarakat agraris makin lama makin berkurang secara perlahan terus bergeser menjadi masyarakat dengan ikatan asosiasi. (Hardi, 2020)

Dari sekian banyak pekerjaan yang timbul dari proses modernisasi, terdapat tiga jenis pekerjaan yang mendapatkan kedudukan tinggi dalam masyarakat Minangkabau, yaitu *Angku Doto* (istilah untuk profesi dokter), *Angku Lareh* (Tuanku Laras), dan *Angku*

Guru (penamaan untuk guru). Tuanku Laras mempunyai kedudukan tinggi dan gaji yang cukup besar, sedangkan guru memiliki peranan dalam mencerdaskan orang lain yang membuat masyarakat bangga terhadap profesi ini, selain itu gaji yang didapat oleh seorang yang berprofesi menjadi guru lumayan tinggi.

Puncak dari proses modernisasi dalam sistem pendidikan, komunikasi, transportasi, dan administrasi telah mendorong meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menguatnya kemampuan ekonomi, memungkinkan masyarakat di Minangkabau untuk memasarkan produk-produk industri. Proses modernisasi tersebut telah memicu lahirnya lapisan-lapisan masyarakat konsumen sebagai penggerak ekonomi pasar. Lahirnya masyarakat konsumen tersebut ditunjang oleh semakin heterogennya pelapisan sosial di daerah-daerah perkotaan, seperti, Fort de Kock, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Sawahlunto.

2. Lahirnya Sekolah Madrasah

Keadaan surau menjadi kurang efektif semenjak didirikannya sekolah-sekolah oleh Belanda. Pada tahun 1913 sekolah yang didirikan Belanda sudah berjumlah 111 sekolah kemudian, setelah dua tahun berkembang pesat menjadi 358 sekolah. Karena keadaan tersebut, lembaga pendidikan Islam di Minangkabau tidak memiliki alternatif lain selain melakukan modernisasi. Sebagai dampak dari banyaknya pembangunan sekolah Belanda tersebut, surau sebagai lembaga pendidikan tradisional di Minangkabau mengalami transformasi. Tujuan utama pemerintah Kolonial Belanda adalah mempertahankan wilayah jajahannya. Karena itu, mereka membuat kebijakan terutama di bidang pendidikan yang menganggap Islam sebagai pesaing yang harus dihadapi. Pendidikan Barat dirancang agar bisa melemahkan pengaruh Islam di Indonesia, karena Islam dianggap sebagai salah satu hambatan terbesar bagi tercapainya tujuan pemerintah kolonial.

Lembaga pendidikan surau di Minangkabau mampu berkembang pesat seiring dengan perkembangan pendidikan pemerintah Belanda. Surau mulai bertransformasi menjadi madrasah, dan tidak hanya mempelajari pelajaran agama, tetapi juga mengajarkan pelajaran umum. Melihat perkembangan surau ini, pada tahun 1882 Belanda membentuk lembaga khusus bernama *Priesterraden* yang bertugas untuk mengawasi aktivitas keagamaan dan pendidikan Islam. Lembaga ini didirikan karena adanya rasa khawatir

pemerintahan Belanda terhadap perkembangan pendidikan Islam, akan menjadi basis perlawanan bagi masyarakat Minangkabau. (Kharles & Nazmi, 2015)

Pada tahun 1905 pemerintahan Belanda menerapkan peraturan baru yang menyatakan bahwa siapapun yang ingin mengajar dan memberikan pengajian Islam harus mendapatkan izin dari pemerintahan Belanda, kemudian pada tahun 1925 aturan tersebut diperketat. Pada tahun 1932 Belanda kembali menerapkan aturan yaitu menutup madrasah atau sekolah yang tidak memiliki izin dari pemerintah Belanda. (Graves, 2007) Tujuan dari dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk membatasi ruang bagi pendidikan Islam, namun usaha tersebut gagal. Pendidikan islam semakin kuat, dan madrasah semakin berkembang pesat.

Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi pembaharuan di Minangkabau, meskipun beliau menjadi guru di Makkah dan tidak kembali ke Minangkabau. Namun, pengaruhnya menyebar sampai ke Nusantara melalui murid-muridnya. Menurut Kafrawi Ridwan, yang dikutip Seno, beberapa murid yang kembali ke Minangkabau di antaranya Muhammad Thaib Umar, Abdul Karim Amrullah, Abbad Abdullah, Abdullah Ahmad, Daud Rasyidi, Abdul Lathif Syukur, Ibarahim Musa Parabek, Agus Salim, dan Sutan Darap Pariaman. (Seno, 2010) Kembalinya dari Makkah, mereka mulai aktif di bidang pendidikan dan dakwah, serta melakukan pembaharuan terhadap surau. Beberapa surau yang diperbaharui adalah Surau Tanjung Sungayang Batusangkar yang didirikan oleh Syekh H.M Thalib Umar tahun 1897 dan Surau Parabek di Bukittinggi yang didirikan oleh Syekh H. Ibarahim Musa Parabek tahun 1908. Menurut Muhammad Yunus, upaya pembaruan dalam pendidikan Islam telah muncul lebih awal sebelum lahirnya sistem madrasah, menandai dimulainya masa perubahan. (Yunus, 1995)

Pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau, dipimpin oleh empat tokoh utama, yaitu Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukittinggi, Haji Abdullah Ahmad di Padang dan Padang Panjang, Syekh Abdul Karim Amrullah di Maninjau dan Padang Panjang, dan Syekh Muhammad Thaib Umar di Batusangkar. Para pendukung gerakan ini, dikenal sebagai Kaum Mudo. Gerakan Kaum Mudo menjadi semakin intensif pada awal abad ke-20. Karena banyak dipengaruhi oleh pemikiran modern dalam Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh. (Fadhil, 2007) Kaum Mudo mengajak umat

Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menolak sikap *taklid* yaitu buta terhadap ajaran ulama dan mazhab tertentu.

Gerakan Kaum Mudo ini, diawali dengan didirikannya sekolah agama yang disebut dengan Madrasah. Madrasah dimodernisasikan dengan meniru gaya barat, baik dari segi sistem, metode pembelajaran, dan kurikulumnya. Sekolah-sekolah yang didirikan Belanda cenderung melarang masuknya ilmu-ilmu agama, berbeda dengan madrasah kental agama dan ditambah dengan pendidikan umum. Pengajaran tidak lagi berlangsung secara klasikal, namun dengan perjenjangan yang jelas. Modernisasi ini bertujuan agar para guru dan ulama memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam kurikulum. Modernisasi pendidikan Islam dilakukan secara intensif dengan standarisasi sistem sekolah, pembukuan kurikulum, metode pengajaran yang mengadopsi model dari sekolah pemerintah Belanda. Selain itu dilakukan juga penerbitan buku-buku teks yang ditulis oleh tokoh-tokoh Kaum Mudo, dan menandai era baru pendidikan agama di Minangkabau. (Seno, 2010)

Di sisi lain, kelompok ulama tradisional terus menentang sistem pendidikan yang dilakukan oleh kaum mudo ini, mereka masih mengarapkan agar sistem pendidikan surau tetap dipertahankan. Melalui rapat besar Kaum Ulama Tradisional yang diadakan oleh ulama tradisional di Parabek Bukittinggi pada tanggal 5 Mei 1930, diputuskan untuk mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI). Persatuan ini memutuskan untuk memodernisasikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang tergabung dalam PTI dengan mengikuti pola yang dikembangkan oleh Kaum Mudo. Akibatnya, ulama tradisional tidak punya pilihan lain selain merombak sistem pendidikan surau, seperti yang dilakukan oleh kaum mudo. (Yunus, 1995) Gerakan mendirikan madrasah yang dilakukan oleh Kaum Mudo ini, melahirkan sekolah-sekolah seperti Adabiyah, Sumatera Thawalib, Madrasah Diniyah, dan Diniyah Putri.

a. Sekolah *Adabiyah*

Sekolah ini didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad di Padang Panjang pada tahun 1907. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan pertama yang menerapkan sistem klasikal, namun berbeda dengan surau. Setelah dua tahun bertahan, sekolah ini ditutup karena mendapat tantangan keras dari masyarakat.

Kemudian pada tahun 1909, sekolah ini dipindahkan ke Padang. Pembangunan sekolah ini mengambil model pembangunan lembaga pendidikan Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiah di Singapura yang didirikan oleh Usman Efendi Rafat dari Mesir. Rencana pembelajaran yang diambil, juga dari rencana pembelajaran yang berkembang di Mesir dan Barat. Jumlah murid pada awalnya terdiri dari 20 orang yang merupakan anak-anak dari para pedagang setempat. (Darwis, 2013) Mata pelajaran wajibnya adalah pelajaran agama dan Al-Quran.

Menurut Burhanuddin Daya, yang dikutip oleh Abdul Fadhil, Adabiyah School Padang dan Diniyah School Padang Panjang dapat dikatakan sebagai perintis pendidikan nasional di bidang sekolah agama, karena menggunakan kurikulum yang menggabungkan pelajaran umum dengan pelajaran agama. Menurut Daya. Kedua sekolah ini adalah contoh perpaduan pendidikan yang seimbang dan selaras. (Fadhil, 2007)

Pada tahun 1915 sekolah Adabiyah menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Nama sekolah ini diubah menjadi *Hollands Malaiche School Adabiyah* dan kepala sekolahnya diganti dengan orang Belanda. Pembelajaran agama yang awalnya merupakan mata pelajaran wajib, mulai kurang diperhatikan. Oleh karena itu, sekolah ini kehilangan tumpuan untuk para golongan pembaharu karena telah dikuasi oleh Belanda. (Seno, 2010)

b. Sumatera *Thawalib*

Sekolah ini bermula dari Surau Jembatan Besi, yang pada awalnya mengajarkan pelajaran agama secara tradisional. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul mulai mengajar di surau tersebut setelah pulang dari Makkah pada tahun 1904, dengan fokus utamanya pada pengajaran bahasa Arab dan disiplin ilmunya.

Tahun 1915, diadakannya rapat umum di Padang Panjang atas inisiatif Bagindo Jamaluddin Rasyad. Rapat tersebut menghasilkan organisasi bernama "Perkumpulan Sabun", yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para pelajar seperti pensil, buku dan lainnya. Organisasi ini berkembang pesat sehingga keuntungan yang didapatkan cukup untuk membayar gaji para guru. Pada tahun 1918 perkumpulan sabun ini diubah menjadi Sumatera Thawalib. Menurut Steenbrink, yang dikutip oleh Seno, menyatakan bahwa nama organisasi ini mungkin terdengar berlebihan karena hanya digunakan untuk organisasi

pelajar di satu surau. Namun, organisasi ini justru memberikan dampak positif bagi masyarakat surau lainnya. (Seno, 2010)

Tahun 1908, Syekh Ibrahim Musa juga mendirikan surau yang bernama Surau Parabek, surau ini terletak di desa Parabek dekat Bukittinggi. Surau ini memiliki banyak murid dari berbagai daerah seperti Lampung, Palembang, Jambi, Riau, Bengkulu, dan Riau. Pada tahun 1919, murid-murid tersebut mendirikan perkumpulan *Muzakarat al-Ikhwani*, untuk mengadakan diskusi ilmiah dan latihan debat. Perkumpulan ini kemudian berganti nama menjadi *Thawalib*.

Pada 15 Februari 1920 diadakan pertemuan yang menyepakati penggabungan Surau Jembatan Besi dengan Surau Parabek menjadi Sumatera Thawalib. Di bawah kepemimpinan Haji Jamaluddin Thaib, Sumatera Thawalib mengadopsi metode pembelajaran modern dengan sistem kelas yang lebih terstruktur, menggunakan bangku dan meja, kurikulum yang ditingkatkan, serta mewajibkan pembayaran uang sekolah. (Seno, 2010)

Pada tahun 1923 saat Sumatera Thawalib berkembang pesat, paham komunis mulai diperkenalkan melalui propaganda seperti adanya tabligh dan penerbitan-penerbitan. Ketertarikan terhadap politik meningkat secara bertahap melalui bacaan koran dan majalah. (Seno, 2010) Para ulama pembaharu umumnya sangat menentang komunisme karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menyusupnya gerakan komunis ini, para pembaharu sangat tergoncang bahkan melemahkan organisasi ini, disusul dengan terjadinya gempa pada tahun 1926 yang menghancurkan bangunan-bangunan sekolah ini. Hingga tahun 1930, konferensi tahunan di Padang Panjang, Batusangkar, dan Bukittinggi diadakan untuk membahas tentang peningkatan sekolah serta masalah lainnya.

c. Madrasah Diniyah

Pada tahun 1915, Zainuddin Labay El-Yunusi mendirikan sebuah sekolah di Padang Panjang yang bernama Diniyah School, yang merupakan perkembangan dari Surau Jembatan Besi. Sekolah ini menerapkan sistem ko-edukasi yang mirip dengan sekolah-sekolah pemerintah Belanda. Sekolah diniyah terdiri dari tujuh kelas, yaitu kelas satu sampai kelas tujuh. Namun, di pedesaan masih terdapat kekurangan guru, sehingga sekolah ini hanya mampu menyelenggarakan

pendidikan kelas empat atau kelas lima saja. Mata pelajaran diantaranya adalah pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Kitab-kitab yang digunakan adalah kitab yang dipakai oleh sekolah-sekolah di Mesir, seperti *Darus Al-Nahwiyah*, *Qawa'id*, *Al-Lughah Al Arabiya*, dan lain-lain. (Yunus, 1995)

Setelah Zainuddin Labay wafat, kepemimpinan sekolah ini dilanjutkan oleh adiknya, Rahmah El-Yunusiyah dan mendirikan sekolah khusus perempuan pada tanggal 1 November 1923 dengan nama Al-Madrasah Al-Diniyah. Pada awalnya terdapat 71 orang murid yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga muda. Mereka mempelajari pelajaran agama dan dilaksanakan di Masjid Pasar Usang Padang Panjang. Pada tahun 1924 lokasinya dipindah ke sebuah rumah yang berada di dekat masjid dan dimulai dengan sistem kelas, bangku, meja, dan papan tulis. Sekolah ini juga menyediakan asrama di lantai atas rumah tersebut. Pada tahun 1930 sebuah kelas tambahan untuk tingkat menengah didirikan, sehingga sekolah ini memiliki tujuh kelas.

Dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh Rahmah, terlihat bahwa ia membagi lembaga pendidikannya ke dalam dua bentuk, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal dijalankan melalui sekolah yang memiliki struktur dan kurikulum yang jelas, sementara pendidikan non-formal berlangsung di lingkungan asrama, di mana para peserta didik mendapatkan pembinaan tambahan di luar jam pelajaran. Melalui pendekatan ini, Rahmah bertujuan untuk mempersiapkan seluruh peserta didiknya menjadi sosok ibu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Dengan kata lain, Rahmah ingin mencetak generasi perempuan yang tangguh dan berperan aktif sebagai pendidik pertama dalam keluarga dan masyarakat. (Aulia et al., 2023)

Pengaruh politik mulai terasa di sekolah yang dipimpin oleh Rahmah ketika organisasi PERTI ikut campur tangan. Organisasi ini berusaha menyatukan seluruh sekolah dari kelompok pembaru di Minangkabau di bawah pengawasannya. Namun, sekolah Diniyah menolak pengawasan dari PERMI. Pada tahun 1930, kegiatan politik di kalangan guru-guru Islam di Minangkabau semakin aktif. Rasuna Said, memilih mengundurkan diri dan pindah ke Padang. Posisinya kemudian diisi oleh tiga guru perempuan: Kanin, Siti Alam, dan

Chasyi'ah. Sayangnya, ketiganya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap menyampaikan ujaran yang melanggar hukum dalam sebuah tabligh. (Seno, 2010)

D. Kesimpulan

Kebijakan pendidikan kolonial Belanda di Minangkabau menghasilkan transformasi besar dalam lanskap pendidikan lokal. Meskipun awalnya bertujuan sebagai instrumen kontrol dan westernisasi, kebijakan ini justru memicu resistensi dan adaptasi kreatif dari masyarakat. Munculnya sekolah nagari dan *normal school* menjadi instrumen kolonial yang kemudian direspons dengan pendirian madrasah modern oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam Minangkabau. Inilah yang membentuk dinamika hibrida antara pendidikan sekuler dan keislaman yang khas, mencerminkan proses dialektika antara dominasi kolonial dan kearifan lokal.

Novelty dari kajian ini terletak pada penekanan bahwa pendidikan tidak sekadar menjadi alat dominasi kolonial, tetapi justru menjadi medium perlawanan simbolik dan transformasi sosial di Minangkabau. Implikasinya signifikan: pendidikan menjadi arena rekonstruksi identitas kolektif dan agen mobilitas sosial masyarakat kolonial. Pemahaman ini penting dalam melihat pendidikan sebagai ruang kontestasi wacana dan aktor, serta sebagai cerminan dari kekuatan adaptif masyarakat lokal dalam menghadapi tekanan eksternal secara strategis.

Daftar Pustaka

- Ahya, C. S., Jurnal, K., Sosial, I., Ahya, C. S., Zalnur, M., & Masyhudi, F. (2024). *Kebijakan Penjajah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*. 2(2), 405–412.
- Alfurqan. (2020). Pendidikan Islam dan Pengaruhnya Terhadap Keber-agamaan di Minangkabau. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10(1), 111–126. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v10i1.274>
- Aulia, W., Junaidi, Iswantir, & Dewi, Y. (2023). Pendidikan Islam Perempuan Minangkabau (Telaah Pemikiran Rahmah El- Yunusiyyah). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7623–7637.
- Azra, A. (2017). *Suaru: Pendidikan Islam Tradisi dalaam Transisi dan Modernisasi* (1st ed.). Kencana.

- Darwis, Y. (2013). *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fadhil, A. (2007). Transformasi Pendidikan Islam di Minangkabau. *Sejarah Lontar*, 4(2), 42–56.
- Graves, E. E. (2007). *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIXXX*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hardi, E. (2020). *Minangkabau: Perkembangan Sejarah dan Kebudayaan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Hasan, M., Hasan, S., Anita, A., Yasir, A., & Basirun, B. (2023). Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang. *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 126–136. <https://doi.org/10.57146/alwildan.v1i3.711>
- Hasanah, U., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum Keluarga Islam Pada Masa Penjajahan Belanda. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 920-927.
- Ilyas, Y. (2022). Solusi Menghidupkan Kembali Pendidikan Surau. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 04(01), 65–73.
- Kharles, & Nazmi, R. (2015). Perubahan pola pendidikan Islam di Sumatera Barat (Minangkabau): Dari surau ke lembaga pondok pesantren semenjak awal abad 20. *Repo.Stkip-Pgri-Sumbar*, 2349–2361.
- Khilal, K. S. (2023). Dialektika Orientasi Keilmuan Ulama di Minangkabau. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 13(1), 87–108. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v13i1.1013>
- Kholik, M. (2025). *Politik Pendidikan Islam*. AE Publishing.
- Ni'mah, Z. A., & Rifa'i, A. (2025). Kompleksitas Peran Madrasah dalam Menjawab Tantangan Era Society 5.0 sebagai Institusi Pembangun Peradaban Rahmatan lil' Ālamīn. *Revorma: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 5(1), 1-15.
- Prenduan, U. A. (2024). *Kebijakan Diskriminatif Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam: Studi Kasus Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar*. 4(2).
- Rajab, M., & Putra, W. A. (2023). Surau dan Modernisasi Pendidikan di Masa Hindia-Belanda. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2), 133–142. <https://doi.org/10.15548/thje.v4i2.5651>
- Riyani, M., & Brata, N. T. (2025). *Merawat Aceh Damai*. Deepublish.
- S. Putra, Y. (2018). *Minangkabau di Persimpangan Generasi*. Perpustakaan Nasional.
- Satria, R. (2016). *Transformasi Pendidikan Islam Di Minangkabau Abad 20 M*. Penerbit Sakata.

- Seno. (2010). *Peran “Kaum Mudo” Dalam Pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau 1803-1942*. BPSNT Padang Press.
- Yasmansyah, & Iswantir. (2021). Modernisasi Pendidikan Islam Awal Abad Ke-20: Pergulatan Ilmiah Akademik Lembaga Pendidikan di Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(2), 185–200. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(2\).7809](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(2).7809)
- Yunus, M. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Mutiara Sumber Widya.